

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH



Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jl. Teratai No.6 Kompleks Perkantoran Pemda Lampung Barat
Telp./Fax. 0728 21115

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat berisi/meliputi kinerja keuangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa LKIP ini masih perlu adanya penyempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Liwa, Pebruari 2026



MAIDAR, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690417 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan penyusunan LKIP, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat juga dapat mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana kerja yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta sekaligus sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu bagian integral dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian selalu bertindak mengakomodir segala permasalahan, menjadi fasilitator dan motivator bagi masyarakat tani. Untuk melaksanakan peran tersebut, disusunlah perencanaan strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dengan mengacu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan telah menetapkan indikator sasaran yang akan dicapai. Adapun isu-isu strategis yang melatar belakangi dalam pemilihan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai antara lain : peningkatan kebutuhan pangan pokok melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan pemenuhan kebutuhan sayuran melalui peningkatan produksi hortikultura.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 secara rinci adalah sasaran yang akan dicapai yaitu *Meningkatnya produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura*, dengan indikator sasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 172.569 Ton.

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja telah dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan anggaran dan program/kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian indikator sasaran pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2025 adalah ***Produksi Tanaman***

Pangan dan Hortikultura sebesar 170.538Ton. Capaian kinerja belum memenuhi target ditunjukkan pada indikator Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, **dengan capaian kinerja 98,82 %.**

Liwa, Pebruari 2026

Kepala Dinas,



NIP. 19690417 199803 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB. I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas dan Fungsi	I-2
C. Struktur Organisasi	I-3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah	I-3
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	I-5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah	II-1
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	II-3
C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra	II-6
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	III-1
A. Analisis SUMberdaya Manusia	III-1
B. Analisis Sarana dan Prasarana	III-4
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024	III-4
.....	
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	IV-1
A. Tindak Lanjut LHEI Tahun 2025	IV-3
B. Capaian Kinerja	IV-1
C. Perbandingan Kinerja	IV-12
D. Realisasi Anggaran	IV-14
E. Pemanfaatan Laporan Kinerja	IV-24
BAB. V PENUTUP	V-1
A. Kesimpulan Umum	V-1
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	V-2
C. Permasalahan	V-2
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	V-3
LAMPIRAN	
Lampiran I : Rencana Aksi Kinerja per Kegiatan	
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahannya	
Lampiran III : Dokumentasi Kegiatan Pembangunan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	II-4
Tabel 2.2	Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	II-6
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat	II-7
Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Kelompok Jabatan dan Pendidikan Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Murni) Tahun 2025	III-5
Tabel 3.3	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Pergeseran) Tahun 2025	III-6
Tabel 3.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Tahun 2025	III-8
Tabel 4.1	Rekomendasi dan tindak lanjut LHE-AKIP Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	IV-1
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	IV-4
Tabel 4.4	Produksi Sayuran Unggulan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	IV-5
Tabel 4.5	Produksi Buah-Buahan Unggulan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	IV-6
Tabel 4.6	Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	IV-12
Tabel 4.7	Perbandingan target kinerja nasional dan kabupaten tahun 2025	IV-13
Tabel 4.8	Perbandingan target kinerja Provinsi dan kabupaten tahun 2024	IV-13



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, tujuan, sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Dasar Hukum pembentukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:



Pj. BUPATI

D. Peran strategis Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pertanian di tingkat daerah tidak boleh terlepas dari perencanaan di tingkat provinsi dan pusat. Terkait dengan perencanaan yang akan disusun harus saling berkaitan dan mendukung keberhasilan dalam rangka mencapai target pembangunan. Hal-hal yang mengharuskan peran PD dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian ke depannya adalah :

a. Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi

Tantangan global di masa mendatang adalah bagaimana penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya. Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari



gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitmen global.

b. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

c. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen.

Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik.

Memperhatikan penataan ruang dan wilayah kabupaten Lampung Barat, dimana penggunaan lahan yang dapat dikelola hanya 40% dari seluruh lahan di Lampung Barat. Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan memerlukan upaya-upaya yang cerdas dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan tidak berdampak merusak lingkungan.

Tantangan yang ada dan berpotensi muncul dari melihat kondisi lingkungan saat ini dan tantangan nasional dalam pencapaian target dan sasaran kinerja pembangunan



pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah penduduk
2. Dampak iklim ekstrim terhadap pelaksanaan budidaya
3. Jumlah produksi pertanian tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas produk.
4. Daya dukung lahan yang semakin berkurang
5. Teknologi inovatif terkini di bidang pertanian
6. Lemahnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan tani dalam manajemen usaha tani.

Potensi peluang yang teridentifikasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mengimbangi kebutuhan akan pangan
2. Peningkatan kemampuan petugas dan petani antisipasi dampak iklim.
3. Peningkatan mutu dan kualitas produk pertanian.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
5. Pengembangan pertanian organik
6. Teknologi inovatif terkini ramah lingkungan di bidang pertanian.

E. Isu Strategis

1. Peningkatan Kebutuhan Pangan Pokok Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat maupun secara nasional mengalami peningkatan dalam setiap tahun. Selaras dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan pokok mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan pokok (beras) mengalami peningkatan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Sayuran Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sayuran segar meningkat. Di samping itu, makin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan yang baik juga merupakan faktor pendorong meningkatnya kebutuhan sayuran, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk menjamin ketersediaan sayuran secara berkelanjutan perlu dilakukan upaya dengan mendukung pelaksanaan budidaya dan menumbuh-kembangkan usaha agribisnis sayuran di tingkat petani. Peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura khususnya sayuran akan mengurangi ketergantungan impor produk hortikultura dan meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar global.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Sasaran Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Strategi Meningkatkan Indeks Pertanaman, dicapai dengan arah kebijakan :
 - 1) Mengembangkan Teknologi Pertanian
 - 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
- b) Strategi Meningkatkan produktivitas, dicapai dengan arah kebijakan :
 - 1) Mengembangkan Teknologi Pertanian
 - 2) Meningkatkan ketersediaan sarana pertanian
 - 3) Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
- c) Strategi Meningkatkan Luas Panen, dicapai dengan arah kebijakan :
 - 1) Mengembangkan Optimalisasi Lahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui program dan kegiatan yang mengacu pada program Pusat dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja merupakan target yang harus dipenuhi oleh bawahan kepada atasan langsung sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya. Perjanjian Kinerja dituangkan dalam rencana aksi yang akan di evaluasi setiap 3 bulan sekali. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target	Definisi Operasional
				Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data		
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	Produktivitas (Ton/Hektar) X Luas Panen (Hektar)	BPS	172.569	Produksi dalam hal ini Produksi Pertanian adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditi. Perhitungan produksi = Produktivitas X Luas Panen. Produktivitas pertanian adalah hasil per satuan luas lahan yang dipanen, sedangkan produksi pertanian adalah jumlah total hasil panen dari seluruh lahan. Contohnya, jika luas lahan seseorang 5 hektar dengan hasil produktivitas 7,2 ton per hektar, maka produksi totalnya adalah 5 hektar x 7,2 ton = 36 ton.



2. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Tahun 2025 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat digambarkan sebagai berikut :



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Tabel 2.2
Kerangka Pendanaan Tahun 2025
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU TAHUN 2024		
						Renja Murni	APBD Murni	APBD Perubahan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.063.480.400	10.529.549.650	12.498.796.442
3	27	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.683.542.400	9.091.884.900	8.701.737.942
3	27	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.436.000	82.436.000	68.376.000
3	27	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.789.205.400	8.203.906.900	8.049.620.942
3	27	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	25.000.000	19.932.000
3	27	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.444.000	146.715.000	104.340.000
3	27	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.890.000	-	-
3	27	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.917.000	244.917.000	205.759.000
3	27	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.650.000	388.910.000	253.710.000
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	770.777.000	351.553.000	284.829.000
3	27	002	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	441.865.000	138.443.000	83.962.000
3	27	002	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	328.912.000	213.110.000	200.867.000
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	709.714.000	130.000.000	2.655.892.000
3	27	003	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000	130.000.000	2.595.000
3	27	003	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	509.714.000	-	2.653.297.000
3	27	005			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	134.059.500	59.867.250	43.382.000
3	27	005	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	134.059.500	59.867.250	43.382.000
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	765.387.500	896.244.500	812.955.500
3	27	007	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	765.387.500	896.244.500	812.955.500
TOTAL						11.063.480.400	10.529.549.650	12.498.796.442

LKIP Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025



C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Untuk itu OPD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2025. Tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2025
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat**

NO.	TUJUAN,SASARAN,PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025	
A.	Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.044.104.118.220	Rupiah
B.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	172.569	Ton
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	74,16	Point
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	4	Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Dokumen
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen



3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Dokumen
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang/bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2	Laporan
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang/bulan
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2	Laporan
4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen



c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket
2)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket
3)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen
4)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	Laporan
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan



		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan
1)	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	96	Unit
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	74	Unit
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	Unit
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan sarana pertanian	1,30	%
a.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	36	Laporan
1)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan
2)	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	36	Laporan
b.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	Dokumen
1)	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen



	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	Dokumen
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian	1,30	%
a.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	Dokumen
1)	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/	1	Dokumen
b.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	Unit
1)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	Unit
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100	%
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	85	Ha
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	85	Ha
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke	200	KT
		Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	8	KT
		Peningkatan kelas Madya ke Utama	2	KT
a.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Unit
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	625	Unit
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan	2	Unit



		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	70	Orang
		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2	Unit
1)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Unit
2)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	625	Unit
3)	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2	Unit
4)	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	70	Orang
5)	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dibentuk	2	Unit



BAB III. KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Sampai akhir tahun 2025 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebanyak 93 orang yang terdiri dari Pegawai negeri sipil sebanyak 60 orang dan PPPK sebanyak 33 orang. Dari PNS sebanyak 60 orang terdiri dari 24 orang struktural dan 36 orang fungsional. Kondisi pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat diterangkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Kelompok Jabatan dan Pendidikan Tahun 2025

1)	Kualifikasi pendidikan			
	PNS			
	a)	SMA	:	2 orang
	b)	D-III	:	13 orang
	c)	Sarjana	:	45 orang
		Jumlah	:	60 orang
	PPPK			
	a)	SMA	:	8 orang
	b)	D-III	:	7 Orang
	c)	Sarjana	:	18 orang
		Jumlah	:	33 orang
		Total Pegawai		93 orang



2)	Pangkat dan Golongan		
	PNS		
a)	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1 orang
b)	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	1 orang
c)	Pembina (IV/a)	:	4 orang
d)	Penata Tingkat I (III/d)	:	14 orang
e)	Penata (III/c)	:	5 orang
f)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	15 orang
g)	Penata Muda (III/a)	:	5 orang
h)	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	1 Orang
h)	Pengatur (II/c)	:	12 orang
i)	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	1 orang
j)	Pengatur Muda (II/a)	:	1 orang
	Jumlah	:	60 orang
	PPPK		
a)	Penata Muda - IIIa	:	18 orang
c)	Pengatur - IIc	:	7 orang
e)	Pengatur Muda - IIa	:	8 orang
	Jumlah	:	33 orang
	Total Pegawai		93 orang
3)	Jabatan Struktural dan Fungsional		
	PNS		
a)	Eselon II/b	:	1 orang
b)	Eselon III/a	:	1 orang
c)	Eselon III/b	:	3 orang
d)	Eselon IV/a	:	2 orang



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

	e)	Eselon IV/b	:	1 Orang
	f)	Fungsional Umum	:	8 Orang
	g)	Fungsional Penyetaraan	:	8 Orang
	h)	Fungsional Penyuluh	:	33 Orang
		Jumlah	:	60 orang
	PPPK			
	a)	Fungsional Umum	:	33 Orang
		Jumlah	:	33 orang
		Total Pegawai		93 orang
4)	Jenis Kelamin			
	PNS			
	a)	Laki-Laki	:	37 orang
	b)	Perempuan	:	23 orang
		Jumlah		60 orang
	PPPK			
	a)	Laki-Laki	:	25 orang
	b)	Perempuan	:	8 orang
		Jumlah		33 orang
		Total Pegawai		93 orang

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya mengandalkan petugas/ aparaturnya yang ada di dinas saja, tetapi juga didukung oleh penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Status penyuluh pertanian adalah polivalen, dimana seluruh dinas lingkup pertanian dapat menggunakan tenaga penyuluh pertanian. Dukungan dari penyuluh pertanian sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksana pembangunan pertanian (*stakeholder*) yaitu petani/ kelompok tani. Dukungan penyuluh pertanian sudah maksimal dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dinas meskipun dilihat dari kebutuhan masih kurang, dimana idealnya jumlah penyuluh pertanian



sebanding dengan jumlah desa yang dalam istilah penyuluhan pertanian disebut Wilayah Kerja Binaan Penyuluh Pertanian (WKBPP).

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang mendukung pelaksanaan tugas berupa sarana mobilisasi dan peralatan kantor adalah kendaraan roda 4 berjumlah 3 unit, kendaraan roda 2 berjumlah 74 unit, Komputer/PC berjumlah 2 unit dan Laptop sebanyak 17 Unit. Prasarana bangunan kantor sebagai tempat pelaksanaan pekerjaan sudah cukup untuk operasional di kabupaten, dimana setiap bidang sudah menempati ruangan tersendiri. Untuk yang di kecamatan sebagai kantor operasional penyuluh pertanian, dari 15 kecamatan baru terdapat 8 unit Kantor Balai Penyuluhan Pertanian dan 7 kecamatan lainnya masih menyewa atau menempati bangunan pemerintah yang tidak terpakai.

Adanya sarana dan prasarana kantor mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan baik yang ada di sekretariat maupun di bidang. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan rutinitas dinas sudah cukup memadai. Dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang yang ada di dinas belum mencukupi. Seiring dengan beban pekerjaan yang besar dengan penyelesaian yang cepat diperlukan pengelolaan prasarana yang memadai untuk memaksimalkan hasil yang dicapai.

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Dinas. Operasional kantor dan kegiatan dapat lebih lancar dan efisien dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Tahun 2025 disahkan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 10.529.549.650,- . Rincian DPA Murni Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.2
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Murni) Tahun 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA- SKPD
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.19.0000/001/2025					
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)		
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp10.529.549.650,00		
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp8.198.406.900,00		
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp2.226.142.750,00		
5	1	05 Belanja Hibah	Rp105.000.000,00		
			Jumlah Belanja	Rp10.529.549.650,00	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp10.529.549.650,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	
			Pembiayaan Neto	Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Liwa, Tanggal 31 Desember 2024 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM NIP. 196612261992031001 Mengesahkan, PKPD  Suandi, S.I.P., M.M. NIP. 197608071999031007	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.108.642.857,00		
Februari	Rp0,00	Februari	Rp856.093.974,00		
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.378.497.540,00		
April	Rp0,00	April	Rp1.021.446.620,00		
Mei	Rp0,00	Mei	Rp816.986.620,00		
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.584.310.540,00		
Juli	Rp0,00	Juli	Rp762.601.870,00		
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp732.351.120,00		
September	Rp0,00	September	Rp715.099.120,00		
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp675.968.120,00		
November	Rp0,00	November	Rp681.712.869,00		
Desember	Rp0,00	Desember	Rp195.838.400,00		
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp10.529.549.650,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	AGUSTANTO BASMAR, S.P., M.Si.	196903021998031007	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
2.	SUMADI, S.I.P., M.M.	197606071999031007	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah		
3.	SUHENDRAWATI, SKM, MP	196701251988032003	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		



Seiring dengan pelaksanaan anggaran dan dinamika yang terjadi serta dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan penataan kembali untuk alokasi anggaran. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) disyahkan pada tanggal 5 Mei 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.437.049.400. Selain untuk pelaksanaan efisiensi, penataan dilakukan untuk menyelaraskan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung keberhasilan program pemerintah yaitu swasembada pangan khususnya padi. Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran (DPPA) Tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Pergeseran) Tahun 2025



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

DOKUMEN PELAKSANAAN PENGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DIPA-SKPD
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPMW.25.27.0.000.00.19.0000001/2025 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						
Rincian Dokumen Pelaksanaan Pengeseran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Berubah / (Berkurang)		
				(Rp)	(%)	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp19.225.340.000,00	Rp12.437.649.400,00	Rp1.907.439.700,00	10,34
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp3.156.408.000,00	Rp3.156.408.000,00	Rp0,00	0,00
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp3.226.142.750,00	Rp1.133.642.500,00	Rp1.907.400.750,00	59,15
5	1	03 Belanja Hibah	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00	Rp0,00	0,00
Rencana Realisasi Pencapaian per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Pencapaian Data per Bulan*) (Rp)			Lmb. Tanggal 05 Mei 2025 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  S. NAKHA TASUWAH MURNI, M.M. NIP. 1956120319920011001 Winkesetikan PPKD  Sumedi, S.P., M.M. NIP. 1973062719900311997
Januari		Rp0,00	Januari		Rp1.426.539.357,00	
Februari		Rp0,00	Februari		Rp757.549.474,00	
Maret		Rp0,00	Maret		Rp1.300.850.546,00	
April		Rp0,00	April		Rp639.660.026,00	
Mai		Rp0,00	Mai		Rp100.348.020,00	
Juni		Rp0,00	Juni		Rp1.654.256.040,00	
Juli		Rp0,00	Juli		Rp2.984.781.620,00	
Agustus		Rp0,00	Agustus		Rp867.641.130,00	
September		Rp0,00	September		Rp670.607.020,00	
Oktober		Rp0,00	Oktober		Rp675.584.903,00	
November		Rp0,00	November		Rp665.675.863,00	
Desember		Rp0,00	Desember		Rp200.772.400,00	
Jumlah		Rp0,00	Jumlah		Rp12.437.649.400,00	
Tipe Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NP	Unit	Tanda Tangan		
1.	INDRA SURUWAN, S.Tu., M.P.	157004011997031005	Pl. Kepala Badan Perencanaan Periode Regional Daerah			
2.	SUMADI, S.P., M.M.	109600371996031007	Pl. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah			
3.	SARJAN, S.H.	15761020000011008	Pl. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan			



Setelah penataan yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, dilakukan penataan kembali dalam Anggaran Perubahan. Perubahan dilakukan setelah dilaksanakannya prognosis anggaran setelah 6 bulan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 disahkan pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan nilai sebesar Rp. 12.498.796.442,-. Rincian DPPA (Perubahan) Tahun 2025 adalah :

Tabel. 3.4
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.19.0000/001/2025						
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
				(Rp)	(%)	
5 1	BELANJ A OPERASI	Rp10.529.549.650,00	Rp12.498.796.442,00	Rp1.969.246.792,00	15.76	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp8.198.406.900,00	Rp8.046.511.942,00	(Rp151.894.958,00)	(1.89)	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.226.142.750,00	Rp4.347.284.500,00	Rp2.121.141.750,00	48.79	
5 1 05	Belanja Hibah	Rp105.000.000,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	0.00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Liwa, Tanggal 10 Oktober 2025 KERALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA MAIDAR, SH, M.Si. NIP. 196904171988031006 Mengesahkan PPKD Sumadi, S.I.P., M.M. NIP. 197606071999031007		
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.121.028.607,00			
Februari	Rp0,00	Februari	Rp758.773.599,00			
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.293.588.790,00			
April	Rp0,00	April	Rp827.939.744,00			
Mei	Rp0,00	Mei	Rp795.126.745,00			
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.446.683.790,00			
Juli	Rp0,00	Juli	Rp2.970.407.245,00			
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp696.090.245,00			
September	Rp0,00	September	Rp667.999.545,00			
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.212.943.546,00			
November	Rp0,00	November	Rp540.094.932,00			
Desember	Rp0,00	Desember	Rp170.119.654,00			
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp12.498.796.442,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SUMADI, S.I.P., M.M.	197606071999031007	Pjt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah			
2.	TRI UMARYANI, S.P., M.Si.	197512291999022001	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
3.	SAHRIL, S.Pd.	196904061991031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan			



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut LHEI Tahun 2025

Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Lampung Barat Nomor : 700/LHE-71/II/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdapat 2 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Rekomendasi dan tindaklanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE-AKIP
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

NO	REKOMENDASI LHE AKIP	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG	KETERANGAN
1.	Memberikan reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP	Predikat kinerja sangat baik atau buruk belum menjadi dasar dalam pemberian reward atau punishment untuk pegawai. Penerapan reward dan punishment baru pada proses penyediaan TPP yang berdasarkan e-kinerja dan absensi pegawai.	Proses penyediaan TPP : https://drive.google.com/drive/folders/1fgeUhefbfpr6AadYZ56DvaBekqNkxfgO?usp=sharing	Belum sepenuhnya dilaksanakan.
2.	Memberikan penjelasan secara rinci cara data kinerja berupa data sekunder di dapat	Untuk mendapatkan data sekunder di Dinas TPH dilakukan melalui 2 cara yaitu: 1. Data kinerja keuangan melalui E-SIAPOnline dan kegiatan dilakukan melalui E-SAKTIBERKIBAR 2. Data kinerja produksi tanaman pangan dan hortikultura dilakukan melalui pendataan oleh petugas ditingkat kecamatan. Untuk selanjutnya dikirim ke kabupaten untuk dilakukan rekaitulasi dan pengolahan data.	Pengumpulan data sekunder data kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1eU0tgLX_Gep_JEH6YUQsNJtFWBeTWITu?usp=sharing	Telah dilaksanakan.



B. Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 1 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	172.569	170.538	98,82

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam hal ini adalah Produksi Pertanian. Produksi pertanian adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditi. Komoditas tanaman pangan terdiri dari padi dan palawija. Komoditas padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang (lahan kering). Sentra produksi padi tersebar di kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Sukau, Kebun Tebu dan Balik Bukit. Jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dalam sub sektor Tanaman Pangan masuk dalam kelompok Palawija. Palawija belum termasuk komoditas tanaman pangan yang prioritas untuk dibudidayakan. Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Lampung Barat terdiri dari hortikultura semusim dan hortikultura tahunan. Hortikultura semusim khususnya sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi, Bawang Daun, kentang, dan Labu Siam. Sentra utama sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit, Sukau, Sekincau, Lumbok Seminung, Kebun Tebu dan Sumberjaya. Hortikultura tahunan dalam hal ini khususnya buah-buahan yang banyak dikembangkan dan bernilai komersial di Lampung Barat antara lain alpukat, durian, jeruk, manggis, pepaya, pisang dan salak. Sentra produksi buah-buahan tersebar



di kecamatan Sukau, Kebun Tebu, Suoh, Lumbok Seminung dan Bandar Negeri Suoh. Untuk mengetahui keragaan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Target	Realisasi	%
A.	Tanaman Pangan			
1	Padi Sawah	86.017	90.530	105,25
2	Jagung	648	1.045	161,36
3	Kedelai	426	2	0,41
4	Kacang Tanah	251	222	88,35
5	Kacang Hijau	5	-	-
6	Ubi Kayu	4.292	3.073	71,60
7	Ubi Jalar	4.276	3.483	81,46
	Jumlah Tanaman Pangan	95.913	98.355	102,55
B.	Hortikultura			
1	Sayuran	45.868	46.777	101,98
2	Buah-buahan	30.788	25.406	82,52
	Jumlah Hortikultura	76.656	72.183	94,16
	TOTAL	172.569	170.538	98,82

Penyumbang kontribusi besar terhadap pencapaian produksi dari sub sektor tanaman pangan adalah padi sawah. Sentra produksi padi sawah adalah di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh, Sukau, Balik Bukit dan Kebun Tebu. Meskipun tidak memenuhi target, ubi jalar berkontribusi terhadap produksi tanaman pangan. Sentra produksi ubi jalar tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Sekincau, Sumberjaya dan Batu Brak. Ubi kayu dengan sentra produksi di Kecamatan Sukau, Kebun Tebu, Lumbok Seminung dan Sumberjaya serta komoditas jagung dengan sentra produksi di Kecamatan Lumbok Seminung, Balik Bukit dan Sukau.

Sub sektor hortikultura yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah sayuran. Keragaan produksi sayuran unggulan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4
Produksi Sayuran Unggulan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No.	Komoditas	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	BAWANG DAUN	206	206	1.465
2	BAWANG MERAH	9	20	155
3	KEMBANG KOL	15	15	144
4	KENTANG	15	14	113
5	KUBIS	336	350	4.853
6	PETSAI/SAWI	317	319	4.395
7	WORTEL	294	313	6.525
8	BUNCIS	220	219	2.971
9	CABE BESAR	113	114	1.960
10	CABAI KERITING	263	301	5.552
11	CABE RAWIT	325	379	2.404
12	LABU SIAM	173	190	1.870
13	TOMAT	319	332	6.861

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi pada komoditas tomat. Sebaran sentra terbesar produksi tomat ada di kecamatan Balik Bukit, SUkau dan Sekincau. Produksi terbesar ke-2 adalah wortel. Wortel adalah komoditas khas dataran tinggi. Sebaran sentra produksi wortel adalah di kecamatan Balik Bukit dan Sukau. Produksi terbesar ketiga adalah cabai keriting. Cabai keriting merupakan varietas cabai besar yang dominan dibudidayakan di kabupaten Lampung Barat. Sentra cabai keriting terbesar berada di kecamatan Balik bukit dan SUkau. Kubis dengan sentra produksi di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Sekincau dan Lumbok Seminung. Petsai/sawi dengan sentra produksi di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Kebun Tebu dan Sekincau. Buncis dengan sentra produksi di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung dan Sumberjaya. Cabai rawit dengan sentra produksi di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Sekincau, Pagar Dewa dan Lumbok Seminung. Cabai besar dengan sentra produksi di kecamatan Sukau, Sekincau, Lumbok Seminung dan Kebun Tebu. Labu siam dengan sentra produksi di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Sekincau, Pagar Dewa dan Lumbok Seminung. Bawang daun dengan sentra produksi dikecamatan Balik Bukit, Sukau, Sekincau dan Lumbok Seminung. Bawang Merah dengan sentra produksi di kecamatan Lumbok Seminung dan Way Tenong. Kembang Kol dengan sentra produksi di kecamatan Sekincau dan Way Tenong. Kentang dengan sentra produksi di kecamatan Sekincau.



Selain produksi sayuran, penyumbang pencapaian produksi sub sektor hortikultura adalah produksi buah-buahan. Keragaan produksi buah-buahan unggulan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

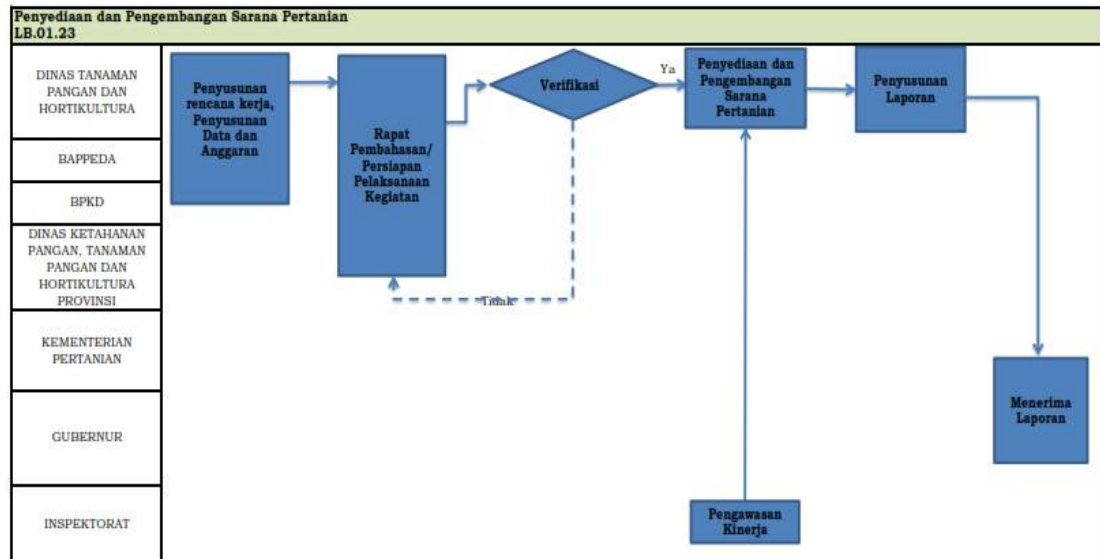
Tabel 4.5
Produksi Buah-Buahan Unggulan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No.	Komoditas	Tanam Baru (Pohon/Rumpun)	Tanaman Sedang Menghasilkan (Pohon/Rumpun)	Produksi (Ton)
1	ALPUKAT	578	38.498	6.515
2	DURIAN	25	9.729	1.188
3	JERUK SIAM/KEPROK	-	7.955	812
4	MANGGIS	5	5.855	844
5	PEPAYA	250	38.124	4.091
6	PISANG	788	88.272	8.154
7	SALAK	-	12.216	301

Pada tahun 2025 produksi terbesar buah-buahan adalah pisang. Sebaran sentra produksi meliputi kecamatan Kebun Tebu, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Alpukat sebagai komoditas unggulan daerah menempati urutan 2 terbesar dengan sentra produksi di kecamatan Lumbok Seminung, Suoh, dan Kebun Tebu. Produksi pepaya dengan sentra produksi di kecamatan Sukau dan Batu Brak. Durian dengan sentra produksi di kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kebun dan Air Hitam. Jeruk siam/keprok dengan sentra produksi di kecamatan Suoh dan Balik Bukit. Manggis dengan sebaran produksi di kecamatan Sumberjaya, Belalau, Suoh dan Kebun Tebu. Salak dengan sentra produksinya tersebar di kecamatan Air Hitam, Belalau dan Suoh

Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dijabarkan dalam peta proses bisnis dari pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan sektor lain yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan program-program.

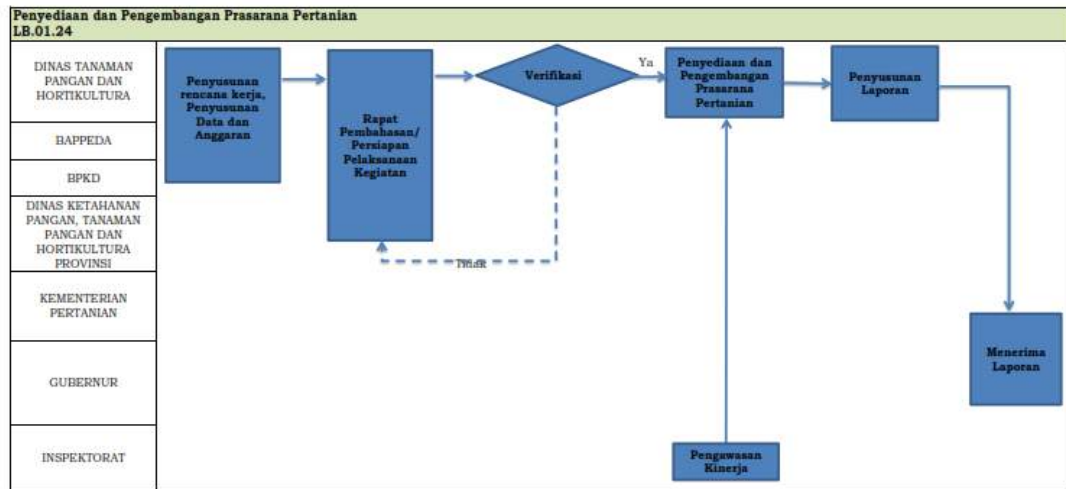
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



Pencapaian kinerja produksi didukung dengan adanya ketersediaan sarana pertanian. Sarana pertanian dalam hal ini adalah benih/bibit, pupuk, pestisida dan alat – alat pertanian (alat pengolahan tanah dan alat pasca panen). Dalam pelaksanaan program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura bersinergi dengan pihak lain. Sinergi dan koordinasi tersebut antara lain :

- Dalam penyusunan dan pembahasan program dan anggaran bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat.
- Dalam pelaksanaan program selain berkoordinasi dengan lingkup kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Provinsi terkait dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pusat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, DAK dan Tugas Pembantuan.
- Persiapan pelaksanaan program berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan apabila diperlukan berkoordinasi dengan Pusat agar supaya program saling mendukung dan berhasil sesuai target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan program selain monitoring dari Dinas instansi pelaksana, dilakukan pengawasan kinerja oleh Inspektorat Kabupaten.
- Setelah selesainya pelaksanaan program dilakukan pelaporan hasil program dan keuangan ke Bappeda, BKAD, Dinas Provinsi, Kementerian Pertanian dan Gubernur.

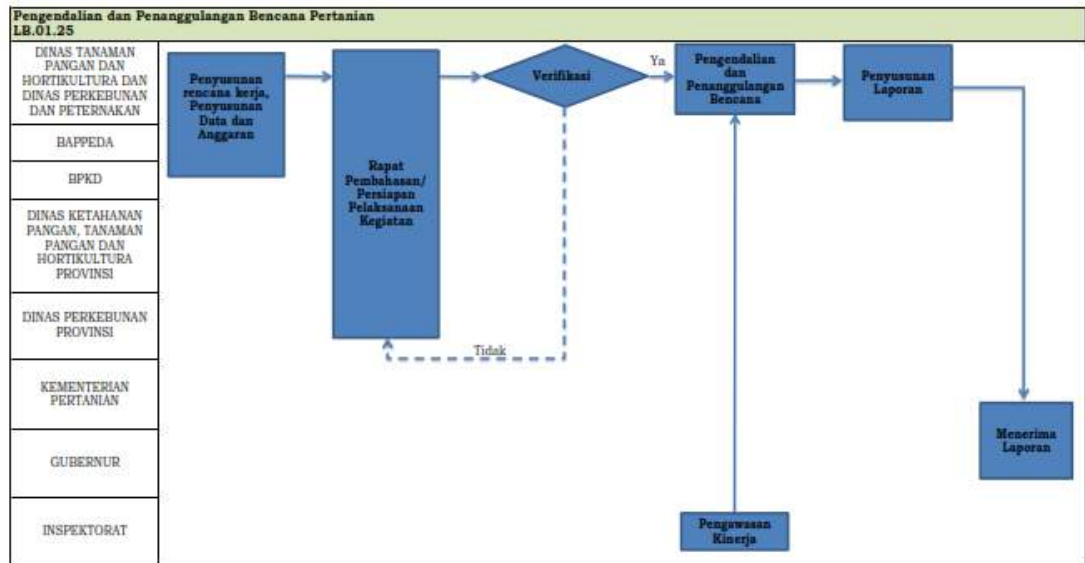
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian



Pencapaian kinerja produksi didukung dengan adanya ketersediaan prasarana pertanian. Prasarana pertanian dalam hal ini prasarana fisik pertanian berupa bangunan kantor, jalan pertanian dan bangunan irigasi (dam parit, embung, prasarana per pompaan). Dalam pelaksanaan program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura bersinergi dengan pihak lain. Sinergi dan koordinasi tersebut antara lain :

- Dalam penyusunan dan pembahasan program dan anggaran bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat untuk APBD Kabupaten. Berkoordinasi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk program dan anggaran yang bersumber dari APBN.
- Dalam pelaksanaan program selain berkoordinasi dengan lingkup kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Provinsi terkait dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pusat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, DAK dan Tugas Pembantuan.
- Persiapan pelaksanaan program berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan apabila diperlukan berkoordinasi dengan Pusat agar supaya program saling mendukung dan berhasil sesuai target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan program selain *monitoring* dari Dinas instansi pelaksana, dilakukan pengawasan kinerja oleh Inspektorat Kabupaten.
- Setelah selesainya pelaksanaan program dilakukan pelaporan hasil program dan keuangan ke Bappeda, BKAD, Dinas Provinsi, Kementerian Pertanian dan Gubernur.

3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

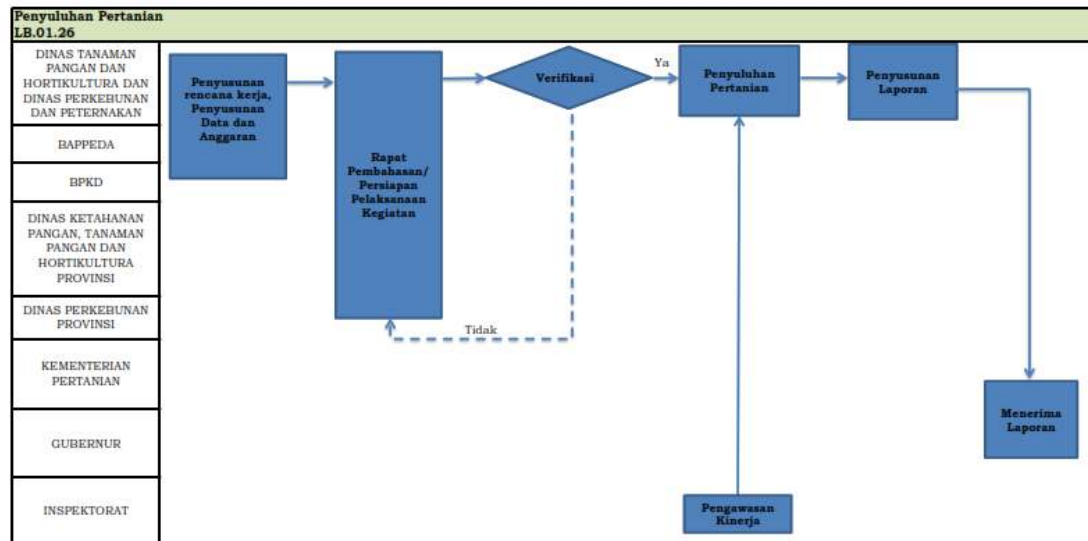


Bencana pertanian sangat berpengaruh dalam pelaksanaan peningkatan produksi pertanian. Bencana pertanian yang sering terjadi diantaranya adalah serangan hama penyakit dan bencana alam berupa banjir. Khusus untuk penanganan dampak banjir Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura harus melakukan koordinasi dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, sinergi dan koordinasi yang dilakukan tersebut antara lain :

- Dalam penyusunan dan pembahasan program dan anggaran bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat.
- Dalam pelaksanaan program selain berkoordinasi dengan lingkup kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Provinsi terkait dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pusat.
- Persiapan pelaksanaan program berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan apabila diperlukan berkoordinasi dengan Pusat agar supaya program saling mendukung dan berhasil sesuai target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan program selain *monitoring* dari Dinas instansi pelaksana, dilakukan pengawasan kinerja oleh Inspektorat Kabupaten.
- Setelah selesainya pelaksanaan program dilakukan pelaporan hasil program dan keuangan ke Bappeda, BKAD, Dinas Provinsi, Kementerian Pertanian dan Gubernur.



4. Penyuluhan Pertanian



Dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian untuk mewujudkan program pembangunan nasional diperlukan petani yang berkualitas, andal dan memiliki kemampuan manajerial, serta kewirausahaan sehingga dapat dikembangkan kemampuannya melalui kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian dan Kembangan penyuluhan yang terbentuk dan menunjukkan fungsinya dalam membangun dinamika dan daya saing bangsa, mulai pada tingkat nasional sampai ke tingkat masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilaksanakan program penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaan program Penyuluhan Pertanian, sinergi dan koordinasi yang dilakukan tersebut antara lain :

- Dalam penyusunan dan pembahasan program dan anggaran di Kabupaten bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat serta bersinergi dengan Dinas Provinsi dan Kementerian Pertanian.
- Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program selain berkoordinasi dengan lingkup kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Provinsi terkait dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pusat.
- Persiapan pelaksanaan program berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan apabila diperlukan berkoordinasi dengan Pusat agar supaya program saling mendukung dan berhasil sesuai target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan program selain monitoring dari Dinas instansi pelaksana, dilakukan pengawasan kinerja oleh Inspektorat Kabupaten.



- e) Setelah selesainya pelaksanaan program dilakukan pelaporan hasil program dan keuangan ke Bappeda, BKAD, Dinas Provinsi, Kementerian Pertanian dan Gubernur.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura" adalah sebesar 170.538 Ton dari target sebesar 172.569 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,82%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Tidak tercapainya target dikarenakan:

1. Turunnya produksi palawija khususnya komoditas ubi jalar. Komoditas palawija bukan merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani. Komoditas palawija secara umum digunakan oleh petani sayuran untuk rotasi tanaman dalam rangka memutus mata rantai hama dan penyakit tanaman sayuran. Meskipun bukan komoditas utama seperti padi, ubi jalar perlu dikembangkan sebagai komoditas alternatif untuk menambah kontribusi peningkatan produksi tanaman pangan. Budidaya ubi jalar mudah dilakukan dan hasil produksi mudah dijual di pasaran. Sarana produksi (benih, pupuk dan obat-obatan) tersedia cukup. Hal utama yang membatasi adalah permodalan. Perlu dilakukan upaya penyediaan sarana permodalan melalui pembiayaan pertanian seperti bantuan modal usahatani baik melalui pemerintah maupun swasta.
2. Turunnya produksi buah-buahan yang merupakan tanaman tahunan. Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembungaan pada tanaman buah-buahan. Perawatan yang belum maksimal dalam budidaya buah-buahan menyebabkan tidak maksimalnya produksi buah-buahan. Budidaya tanaman buah-buahan membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan, minimal baru menghasilkan setelah 2-3 tahun dari awal tanam. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan pengembangan buah-buahan secara intensif. Dari 22 komoditas buah-buahan, baru alpukat dan pisang yang dikembangkan secara intensif di Lampung Barat. Alpukat dan pisang berkontribusi besar terhadap peningkatan produksi buah-buahan. Pengembangan semua komoditas akan membutuhkan biaya yang besar. Perlu dipilih komoditas yang prioritas untuk dikembangkan dan pembinaan secara intensif. Komoditas buah-buahan yang berpotensi dikembangkan di Lampung Barat adalah durian, pepaya, jeruk siam dan salak.
3. Selain faktor teknis yang tersebut diatas, tidak bisa ditinggalkan adalah faktor kebiasaan petani, dimana selain budidaya tanaman pangan atau hortikultura juga budidaya kebun khususnya kopi. Selain memiliki lahan tanaman pangan atau



hortikultura, petani di Lampung Barat memiliki kebun kopi. Sehingga ketika musim kopi tiba, semua kegiatan terkonsentrasi dan kegiatan usaha tani lainnya diberhentikan. Hal ini tidak dapat dihindari dan akan berulang setiap tahun. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan waktu pengelolaan usahatani sehingga kebun, sawah atau sayurannya memperoleh hasil yang memuaskan.

C. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun 3 Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023-2026 dengan Indikator Kinerja Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perbandingan dengan kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4.6
Analisis Pencapaian Kinerja
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	212011	167.904,46	79,20	172.569	170.538	98,82

Kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2024. Hal ini dikarenakan naiknya produksi padi dan komoditas sayuran yang merupakan penyumbang besar untuk pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura meskipun produksi buah-buahan mengalami penurunan produksi yang menyebabkan tidak tercapainya target tahun 2025.

2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan target nasional perlu diuraikan dengan target produksi komoditas unggulan. Perbandingan dengan target nasional dapat diterangkan sebagai berikut:



Tabel 4.7
Perbandingan target kinerja nasional dan kabupaten tahun 2025

No.	Komoditas	Target Nasional	Target Kab.	Realisasi Kab.
1.	Produksi Padi	6,72%	1,41%	8,83%
2.	Peningkatan Produksi Jagung	3,33%	1,41%	37,74%
3.	Peningkatan Produksi Kedelai	7,09%	1,41%	50,00%
4.	Peningkatan produksi sayuran	3%	0,5%	28,47%
5.	Peningkatan produksi buah-buahan	5,2%	0,5%	-25,52%

Target yang ditetapkan kabupaten lebih rendah dibandingkan dengan target nasional. Rendahnya target kabupaten dikarenakan kondisi realisasi produksi tahun-tahun sebelumnya dan dukungan dari daerah yang belum optimal terutama sumber daya manusia dan pendanaan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan sayuran lebih tinggi dari target nasional dan target kabupaten. Untuk komoditas buah-buahan mengalami penurunan yang signifikan.

3. Perbandingan Kinerja dengan target atau capaian kinerja tingkat Provinsi Lampung

Target kinerja Provinsi didasarkan pada peningkatan produksi komoditas unggulan nasional. Perbandingan dengan Kinerja Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan target kinerja Povinsi dan kabupaten tahun 2025

No.	Komoditas	Target Provinsi	Target Kab.	Realisasi Kab.
1.	Produksi Padi	7%	1,41%	8,83%
2.	Peningkatan Produksi Jagung	1.02%	1,41%	37,74%
3.	Peningkatan Produksi Kedelai	0,06%	1,41%	50,00%
4.	Peningkatan Produksi Ubi Kayu	1,02%	1,41%	-15,85%
5.	Peningkatan produksi Cabe Besar	4,5%	0,5%	42,43%
6.	Peningkatan produksi Bawang Merah	4,8%	0,5%	-27,04%
7.	Peningkatan produksi Pisang	32,00%	0,5%	-41,00%
8.	Peningkatan produksi Manggis	7,51%	0,5%	-5,39%

Hasil kinerja kabupaten yang melebihi target provinsi adalah peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan cabe besar . Komoditas yang lain di bawah target provinsi. Produksi ubi kayu berfluktuasi setiap tahun dan bukan merupakan komoditas utama yang dibudidayakan petani. Adapun hasil kinerja yang dibawah target propinsi adalah bawang merah, pisang dan manggis.

4. Benchmarking

Perbandingan target kinerja perangkat daerah yang sejenis di tingkat provinsi, berarti membandingkan target kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Dalam hal ini target kinerja Provinsi merupakan target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Secara umum produksi tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Lampung Barat mendukung program peningkatan produksi di provinsi Lampung. Ada beberapa komoditas yang belum mencapai target propinsi, yaitu ubi kayu, bawang merah, pisang dan manggis. Perlu direncanakan upaya-upaya yang kongkrit dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Komoditas yang telah mencapai target diantaranya padi, jagung, kedelai dan cabai besar. Bagi yang telah mencapai target perlu dipertahankan dan merencanakan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya.



Dengan adanya perbandingan tersebut kita dapat mengetahui tingkat kemampuan kita dalam pencapaian target kinerja yang sejenis. Melihat kekurangan dan keunggulan kita dalam rangka pencapaian target kinerja. Lebih meningkatkan keunggulan kita dan dapat belajar dari daerah lain untuk mengatasi kekurangan kita agar supaya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

D. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 12.498.796.442,-. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 12.104.596.509,- atau sebesar 96,85%. Untuk mengetahui alokasi dan realisasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdapat di seluruh perangkat daerah karena merupakan program rutin yang mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.701.737.942,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.343.847.065,- atau sebesar 95,89%. Rincian untuk per kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran baik yang dilakukan secara berkala maupun tahunan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.376.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.831.000,- atau sebesar 99,20%. Untuk rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adalah subkegiatan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja program dan anggaran di perangkat daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.227.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.682.000,- atau sebesar 97,00%. Dalam subkegiatan ini dilakukan penyusunan Renja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja (PK), Perubahan Renja, Perubahan Rencana Aksi dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, merupakan pelaksanaan koordinasi dan menyusun RKA Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran



sebesar Rp. 1.474.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.474.000,- atau sebesar 100,00%.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.430.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.430.000,- atau sebesar 100,00%.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Perangkat Daerah yang merupakan acuan dalam pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan subkegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 2.195.000,- , dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.195.000,- atau sebesar 100,00%.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan DPA Murni dengan alokasi anggaran Rp. 1.375.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.375.000,- atau sebesar 100,00%.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan – laporan evaluasi baik yang secara berkala maupun tahunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.675.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.675.000,- atau sebesar 100,00%.

Subkegiatan ini berisi kegiatan penyusunan evaluasi pelaporan triwulan, semesteran dan tahunan yang merupakan rangkaian evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan. Penyiapan data untuk bahan penyusunan pelaporan selain dari intern dinas, dilaksanakan pelaksanaan survey pertanian. Hasil dari pelaksanaan survey sebagai bahan penyusunan realisasi tanam, panen dan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Bahan hasil olahan tersebut diatas yang berupa data digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir Dinas.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam bagian keuangan baik dari segi penyediaan anggaran maupun laporan penyerapan anggarannya. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.049.620.942,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.735.826.122,- atau sebesar 96,10%. Rincian untuk per subkegiatan adalah sebagai berikut :



- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan untuk PNS dan PPPK selama 1 tahun. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.046.511.942,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.732.717.122,- atau sebesar 96,10%.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi anggaran Rp. 1.170.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.170.000,- atau sebesar 100,00%.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan semester yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.135.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.135.000,- atau sebesar 100,00%.
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Melakukan penyusunan laporan prognosis dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi anggaran dan perkiraan untuk perubahan anggaran. Alokasi anggaran sebesar Rp. 804.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 804.000,- atau sebesar 100,00%.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah kegiatan yang mendukung evaluasi, monitoring dan peningkatan kinerja pegawai. Alokasi anggaran Rp. 19.932.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.932.000,- atau sebesar 100,00%. Rincian sub kegiatannya adalah :
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja pegawai melalui rapat internal ataupun eksternal. Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.932.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.932.000,- atau sebesar 100,00%.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan/diklat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100,00%. Pegawai yang dikirim sebanyak 3 orang dengan mengikuti diklat Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Kegiatan ini merupakan pendukung pelaksanaan rutinitas untuk penyediaan komponen listrik, barang



cetak, penggandaan, langganan surat kabar, menjamu tamu dan kebutuhan perjalanan dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 104.340.00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.186.839,- atau sebesar 99,85%. Rincian untuk per subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Menyediakan peralatan listrik untuk bangunan kantor seperti lampu, saklar, roller, kabel dan lain-lain. Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.500.000,- atau sebesar 100,00%.
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Melaksanakan penyediaan barang cetak seperti cetak untuk administrasi keuangan dan cetak spanduk serta penyediaan penggandaan untuk administrasi keuangan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.765.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.765.000,- atau sebesar 100,00%.
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Melaksanakan penyediaan biaya langganan surat kabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.960.000,- atau sebesar 100,00%.
- 4) Fasilitas Kunjungan Tamu. Melaksanakan penyediaan makanan ringan atau snack yang disajikan untuk tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau sebesar 100,00%.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Melaksanakan penyediaan biaya untuk koordinasi melalui perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 74.515.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.361.839,- atau sebesar 99,79%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan biaya jasa untuk keperluan perangkat daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 205.759.000,- dan realisasi anggaran Rp. 177.010.004,- atau sebesar 86,03%.

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat. Melaksanakan kegiatan surat menyurat keperluan dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 500.000,- atau sebesar 100,00%.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Melaksanakan penyediaan biaya listrik, air dan langganan internet dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.840.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.891.004,- atau sebesar



58,18%. Capaian realisasi anggaran tidak mencapai 90,00% dikarenakan pengeluaran disesuaikan dengan bukti pengeluaran.

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Melaksanakan penyediaan pelayanan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 138.419.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.619.000,- atau sebesar 99,42%. Sub kegiatan ini mendukung dan penyediaan ATK untuk Dinas dan BPP, Jasa dan alat/bahan kebersihan untuk Dinas dan BPP serta penyediaan jasa keuangan.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan barang aset perangkat daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 253.710.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 239.061.300,- atau sebesar 94,23%. Rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional baik kendaraan R4 maupun R2. Alokasi anggaran sebesar Rp 196.260.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.641.100,- atau sebesar 95,09%. Dalam pemeliharaan disediakan untuk biaya BBM, biaya pajak dan biaya pemeliharaan (spare part).
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Melaksanakan pemeliharaan peralatan mesin kantor seperti genset, mesin potong rumput dan komputer. Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.950.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.950.000,- atau sebesar 100,00%.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Melaksanakan pemeliharaan bangunan kantor untuk kebersihan dan kerapian. Alokasi anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.470.000,- atau sebesar 86,93%. Pada sub kegiatan ini dilakukan pemeliharaan rutin kantor dan biaya sewa kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 4 Unit.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tidak terlepas dari ketersediaan sarana pertanian. Sarana Pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian.



Komponen sarana pertanian yang meliputi bibit/benih, pupuk, pestisida dan alsintan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 284.829.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 273.746.699,- atau sebesar 96,11%. Rincian alokasi anggaran per kegiatan adalah :

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sarana Pertanian memegang peranan penting dan merupakan pendukung utama dalam pembangunan pertanian secara keseluruhan. Mengingat pentingnya peran sarana pertanian maka perlu dilakukan pengawasan penggunaannya untuk sarana pertanian agar supaya berdaya guna untuk pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.962.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.502.725,- atau sebesar 98,26%. Rincian untuk subkegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung untuk budidaya pertanian di tingkat lapangan untuk 15 kecamatan. Jenis sarana pertanian yang diawasi adalah sarana produksi berupa pupuk dan pestisida. Pengawasan dilakukan agar supaya alokasi pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tepat waktu, sasaran dan penggunaannya. Alokasi anggaran sebesar Rp.. 27.425.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.200.275,- atau sebesar 99,18%.

2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

SUBkegiatan ini melakukan pendampingan dan pembinaan penggunaan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian baik untuk pasca panen, pembersih lahan dan pengolahan tanah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 56.537.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.302.450,- atau sebesar 97,82%.

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Merupakan kegiatan pengelolaan sumberdaya genetik tanaman sesuai dengan spesifik lokasi baik melalui penangkaran, pengenalan dan pengembangannya untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Alokasi anggaran untuk



kegiatan ini sebesar Rp. 200.867.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.243.974,- atau sebesar 95,21%. Rincian untuk per subkegiatan adalah :

1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Melaksanakan pembinaan penangkaran benih buah-buahan, pengembangan biofarmaka dan pemasyarakatan dan pengembangan tanaman buah-buahan ke masyarakat. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 74.302.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.771.074,- atau sebesar 88,52%.

2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Melaksanakan pemanfaatan benih/bibit unggul dan kelengkapan sarana produksi lainnya untuk mendukung pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura. Alokasi anggaran sebesar Rp. 126.564.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.472.900,- atau sebesar 99,14%.

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, penanganan Prasarana Pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Pengembangan prasarana pertanian dilakukan melalui pengelolaan lahan usahatani dan pembangunan atau rehabilitasi prasarana pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.655.892.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.650.792.070,- atau sebesar 99,81%.

a. Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan prasarana pertanian berupa lahan usahatani dalam hal ini adalah baku lahan sawah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.595.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.250.000,- . Pada saat perubahan, baik kegiatan maupun subkegiatan dilakukan penataan ulang untuk pembangunan jalan usahatani dalam rangka mendukung swasembada pangan. Kegiatan dan subkegiatan ini dialihkan ke kegiatan pembangunan prasarana pertanian dengan subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

b. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kabupaten Lampung Barat. Alokasi anggaran sebesar Rp.



2.653.297.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.648.542.070,- atau sebesar 99,82%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan subkegiatan:

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Melaksanakan penyediaan prasarana pertanian berupa prasarana irigasi dan jalan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.653.297.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.648.542.070,- atau sebesar 99,82%. Hasil dari subkegiatan ini adalah 15 Unit prasarana irigasi yang tersebar di 3 kecamatan sentra produksi padi yaitu Kecamatan Sukau, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Pembangunan jalan usahatani sebanyak 1 Unit di Kecamatan Kebun Tebu serta bantuan sarana pendukung irigasi berupa pompa air sebanyak 2 Unit.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Merupakan program untuk mengantisipasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang berpengaruh terhadap budidaya pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.382.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.330.250,- atau sebesar 97,58%. Program ini didukung dengan kegiatan :

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 43.382.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.330.250,- atau sebesar 97,58%. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan subkegiatan :

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Melakukan pelaksanaan pengendalian secara berkala Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura secara bersama-sama berupa gerakan massal yang melibatkan Dinas terkait, petugas lapangan dan petani/kelompok tani. Alokasi anggaran 43.382.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.330.250,- atau sebesar 97,58%. Pelaksanaan dilakukan sebanyak 3 kali untuk gerakan pengendalian HPT Tanaman Pangan dan 1 kali untuk Gerakan pengendalian HPT Hortikultura serta diadakannya 1 paket stock pestisida.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Keberadaan Penyuluh Pertanian di wilayah yang mengandalkan usaha pertanian adalah sangat vital peranannya dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan



pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 812.955.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 793.880.425,- atau sebesar 97,65%.

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Program Penyuluhan Pertanian. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi penyuluh pertanian dan petani/kelompok tani dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 812.955.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 793.880.425,- atau sebesar 97,65%. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilaksanakan secara rinci dengan subkegiatan :

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Melaksanakan peningkatan kapasitas melalui penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan penyusunan program penyuluhan pertanian. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini setelah efisiensi sebesar Rp. 153.375.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 150.382.350,- atau sebesar 98,05%. Melalui subkegiatan ini telah dilakukan pelatihan penyuluh pertanian, penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan dan kabupaten serta tersedianya bantuan dukungan untuk penyuluh pertanian berupa dukungan operasional.

2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani berupa kelompok tani, kelompok wanita tani dan organisasi masyarakat pendukung pembangunan pertanian. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 189.418.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 188.716.500,- atau sebesar 99,63%. Capaian kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah kelompok tani terbina sebanyak 670 Kelompok Tani dan Jumlah organisasi yang menerima hibah sebanyak 3 Organisasi.

3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Melaksanakan peningkatan keterampilan petani/kelompok petani melalui penyelenggaraan sekolah lapang pupuk organik dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 89.315.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.946.850,- atau sebesar 96,23%. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah



Jumlah kelompok tani SL-PPO sebanyak 1 KT dan Jumlah kelompok tani SL-PHT Hortikultura sebanyak 1 KT.

4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Subkegiatan ini adalah tambahan alokasi kegiatan dari kementerian pertanian untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian berupa biaya bantuan operasional mobilitas penyuluh di lapangan. Alokasi dana sebesar Rp. 323.760.00,- dengan realisasi anggaran sebesar 313.120.000,- atau sebesar 96,71%.

5) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Melaksanakan pembinaan dan pembentukan lembaga keuangan mikro di tingkat kelompok tani/gapoktan dan fasilitasi pembiayaan pertanian untuk modal usahatani. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 57.086.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.714.725,- atau sebesar 97,59%. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Ekonomi yang tumbuh sebanyak 2 Unit.

E. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja bagi Dinas Terkait adalah :

1. Sebagai dasar dalam perbaikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bagi perencanaan berikutnya.
2. Bahan evaluasi kinerja pegawai pada target kinerja yang diembannya dan memberikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar supaya pelaksanaan lebih baik.
3. Laporan Kinerja juga sebagai acuan dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi terkait untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu Indikator Kinerja Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura" adalah sebesar 170.538 Ton dari target sebesar 172.569 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,82%

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.498.796.442,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.104.596.509,-. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 394.199.933,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.104.596.509,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk



menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah 96,85% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Barat.

Secara umum semua kegiatan yang dilaksanakan tercapai target kinerjanya. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam renstra maupun renja dimungkinkan terdapat perbedaan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja dengan alokasi anggaran.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura secara umum berjalan dengan baik. Terlaksananya kegiatan dengan baik secara umum dikarenakan :

1. Koordinasi yang baik antara aparaturnya kabupaten dan penyuluh pertanian di kecamatan sebagai pendukung pelaksana kegiatan di lapangan. Aparatur kabupaten memberikan petunjuk dan arahan yang harus dilakukan kepada penyuluh pertanian. Dengan didampingi oleh petugas kabupaten, penyuluh pertanian berinteraksi langsung dengan obyek kegiatan yaitu kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi dan evaluasi secara tentatif dan terjadwal antara pimpinan dan staf di kabupaten maupun antara pimpinan, staf serta petugas lapangan. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat diketahui permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya/solusi dalam penyelesaian permasalahan.

C. Permasalahan

Permasalahan- permasalahan pada tahun 2025 yang berpengaruh dalam pencapaian target kinerja yaitu meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi sawah sangat tergantung dengan kesediaan lahan baku sawah yang terbatas dan alih



fungsi menjadi lahan pertanian non sawah. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi lahan yang tersedia melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas perlahan untuk meningkatkan produksi padi.

2. Menurunnya produksi hortikultura khususnya buah-buahan yang disebabkan factor iklim dan perawatan budidaya yang belum maksimal. Mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pembinaan secara intensif untuk meningkatkan produksi.

D. Rekomendasi dan tindak lanjut

Dari indikator kinerja sasaran tercapai dengan nilai 98,82%, di bawah 100%. secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melihat hasil tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Menelaah dan membahas secara bersama pihak-pihak yang terkait dalam pencapain target kinerja dan menetapkan langkah-langkah dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien untuk menjamin sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal dalam pencapaian target kinerja.



LAMPIRAN I
RENCANA AKSI KINERJA PERKEGIATAN

Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1.	Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Produksi Tanaman Pangan (Rupiah)	124.222.309.638	248.444.619.275	331.259.492.367	496.889.238.550	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	23.978	47.957	69.942	95.913	Kepala Dinas
		Nilai Produksi Hortikultura (Rupiah)	136.803.719.918	273.607.439.835	364.809.919.780	547.214.879.670		Produksi Hortikultura (Ton)	19.164	38.328	51.104	76.656	
			261.026.029.555	522.052.059.110	696.069.412.147	1.044.104.118.220			43.142	86.285	115.046	172.569	

Liwa, Pebruari 2025

Kepala Dinas


Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661226 199203 1 001

Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Periode 2023-2026

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	Trw 1 = 0 Point Trw 2 = 0 Point Trw 3 = 0 Point Trw 4 = 74,16 Point	Trw 1 = Rp 3.154.083.371 Trw 2 = Rp 5.642.053.151 Trw 3 = Rp 7.622.135.011 Trw 4 = Rp 9.091.884.900	Sekretaris Dinas
2.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	Trw 1 = 0 % Trw 2 = 0 % Trw 3 = 0 % Trw 4 = 1,3 %	Trw 1 = Rp 81.356.000 Trw 2 = Rp 232.099.000 Trw 3 = Rp 308.806.000 Trw 4 = Rp 351.553.000	Kepala Bidang Hortikultura
3.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Trw 1 = 0 % Trw 2 = 0 % Trw 3 = 0 % Trw 4 = 1,30 %	Trw 1 = Rp 13.668.000 Trw 2 = Rp 119.359.000 Trw 3 = Rp 130.000.000 Trw 4 = Rp 130.000.000	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	Trw 1 = 25 % Trw 2 = 50 % Trw 3 = 75 % Trw 4 = 100 %	Trw 1 = Rp 6.765.000 Trw 2 = Rp 32.973.500 Trw 3 = Rp 56.094.750 Trw 4 = Rp 59.867.250	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
4		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	Trw 1 = 0 KT	Trw 1 = Rp 87.062.000	Kepala Bidang Tanaman Pangan

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	
				Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	Trw 1 = 0 KT		
				Peningkatan kelas Madya ke Utama	Trw 1 = 0 KT		
				Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	Trw 2 = 0 KT	Trw 2 = Rp 739.493.500	
				Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	Trw 2 = 0 KT		
				Peningkatan kelas Madya ke Utama	Trw 2 = 0 KT		
				Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	Trw 3 = 0 KT	Trw 3 = Rp 856.194.500	
				Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	Trw 3 = 0 KT		
				Peningkatan kelas Madya ke Utama	Trw 3 = 0 KT		
				Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	Trw 4 = 200 KT	Trw 4 = Rp 896.244.500	
				Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	Trw 4 = 8 KT		
				Peningkatan kelas Madya ke Utama	Trw 4 = 2 KT		
TOTAL						Trw 1 = Rp 3.342.934.371 Trw 2 = Rp 6.765.978.151 Trw 3 = Rp 8.973.230.261 Trw 4 = Rp 10.529.549.650	

Liwa, Pebruari 2025

Kepala Dinas


Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661226 199203 1 001

Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp 34.856.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
					Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 1 = 1 Dokumen		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = Rp 49.881.000	
					Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 2 = 2 Dokumen		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 2 = 5 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp 57.171.000	
					Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 3 = 2 Dokumen		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 3 = 7 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 4 = 8 Dokumen	Trw 4 = Rp 82.436.000	
					Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 4 = 4 Dokumen		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
						Target	Target		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 4 = 13 Dokumen			
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 95 Orang/bulan	Trw 1 = Rp 2.807.899.371	Kasubbag Keuangan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Trw 1 = 0 Laporan			
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Trw 1 = 0 Laporan			
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Trw 2 = Rp 5.104.775.151		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 0 Dokumen			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 2 = 95 Orang/bulan			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Trw 2 = 0 Laporan			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Trw 2 = 1 Laporan		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 2 = 1 Dokumen		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 3 = 95 Orang/bulan	Trw 3 = Rp 6.878.122.011	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 3 = 0 Laporan		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Trw 3 = 1 Laporan		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 3 = 1 Dokumen		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 4 = 95 Orang/bulan	Trw 4 = Rp 8.203.906.900	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keluaran Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 4 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 4 = 2 Laporan		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 4 = 1 Dokumen		
3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 3.459.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 0 Orang		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 20.637.000	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 2 = 3 Orang		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 3 = 3 Dokumen	Trw 3 = Rp 22.822.000	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 3 = 3 Orang		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp 25.000.000	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 4 = 3 Orang		
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp 74.525.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket		
						Trw 1 = 4 Dokumen		
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 0 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 10 Laporan		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp 85.631.000	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 2 = 2 Paket		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 2 = 4 Dokumen		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 2 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 2 = 10 Laporan		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp 135.603.000	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 3 = 3 Paket		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 3 = 4 Dokumen		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 3 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 3 = 17 Laporan		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp 146.715.000	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 4 = 3 Paket		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 4 = 4 Dokumen		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 4 = 2 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 4 = 20 Laporan		
6			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp 79.654.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Trw 1 = 0 Laporan		
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Trw 1 = 0 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp 131.599.000	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 2 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 2 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 208.047.000	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 3 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 4 = 2 Laporan	Trw 4 = Rp 244.917.000	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 4 = 2 Laporan		
7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 4 = 2 Laporan		Kasubbag Umum dan Perencanaan
					Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 34 Unit	Trw 1 = Rp 153.690.000	
						Trw 2 = 62 Unit	Trw 2 = Rp 249.530.000	
						Trw 3 = 93 Unit	Trw 3 = Rp 320.370.000	
8		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 4 = 96 Unit	Trw 4 = Rp 388.910.000	Subkoordinator Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 35.786.000	
						Trw 1 = 9 Laporan		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 104.561.000	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Trw 2 = 18 Laporan		
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 127.901.000	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Trw 3 = 27 Laporan		
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 138.443.000	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Trw 4 = 36 Laporan		
9			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 45.570.000	Subkoordinator Substansi Produksi Tanaman Hortikultura
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Trw 1 = 0 Dokumen		
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 127.538.000	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Trw 2 = 1 Dokumen		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 180.905.000	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Trw 3 = 1 Dokumen		
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 213.110.000	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Trw 4 = 2 Dokumen		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 13.668.000	Kasi Lahan dan Irigasi
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 119.359.000	
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 130.000.000	
10		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 130.000.000	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
						Trw 1 = 20 Ha	Trw 1 = Rp 6.765.000	
						Trw 2 = 65 Ha	Trw 2 = Rp 32.973.500	
						Trw 3 = 90 Ha	Trw 3 = Rp 56.094.750	
						Trw 4 = 105 Ha	Trw 4 = Rp 59.867.250	
11		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 1 = 15 Unit	Trw 1 = Rp 87.062.000	Kepala UPTD BPPP

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 1 = 0 Unit		
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang dimanfaatkan	Trw 1 = 0 Unit		
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dibentuk	Trw 1 = 0 Unit		
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Trw 1 = 1 Unit		
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 2 = 15 Unit	Trw 2 = Rp 739.493.500	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 2 = 0 Unit		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang dimanfaatkan	Trw 2 = 0 Unit		
					Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Trw 2 = 0 Unit		
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Trw 2 = 3 Unit		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 3 = 15 Unit	Trw 3 = Rp 856.194.500	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 3 = 0 Unit		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang dimanfaatkan	Trw 3 = 0 Unit		
					Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Trw 3 = 0 Unit		
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Trw 3 = 4 Unit		
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 4 = 15 Unit	Trw 4 = Rp 896.244.500	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 4 = 625 Unit		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang dimanfaatkan	Trw 4 = 0 Unit		
					Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Trw 4 = 3 Unit		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Trw 4 = 4 Unit		

Liwa, Pebruari 2025

Kepala Dinas



Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199203 1 001

Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen Trw 2 = 4 Dokumen Trw 3 = 4 Dokumen Trw 4 = 8 Dokumen	Trw 1 = Rp 20.446.000 Trw 2 = Rp 20.446.000 Trw 3 = Rp 20.446.000 Trw 4 = Rp 22.436.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp - Trw 3 = Rp 425.000 Trw 4 = Rp 2.500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 1.475.000 Trw 3 = Rp 1.475.000 Trw 4 = Rp 2.500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 2.500.000 Trw 2 = Rp 2.500.000 Trw 3 = Rp 2.500.000 Trw 4 = Rp 2.500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp - Trw 3 = Rp 365.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.500.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 = 2 Dokumen Trw 2 = 5 Dokumen Trw 3 = 7 Dokumen Trw 4 = 13 Dokumen	Trw 1 = Rp 11.910.000 Trw 2 = Rp 25.460.000 Trw 3 = Rp 34.460.000 Trw 4 = Rp 50.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
2.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 95 Orang/bulan Trw 2 = 95 Orang/bulan Trw 3 = 95 Orang/bulan Trw 4 = 95 Orang/bulan	Trw 1 = Rp 2.807.899.371 Trw 2 = Rp 5.101.895.151 Trw 3 = Rp 6.875.242.011 Trw 4 = Rp 8.198.406.900	Subkoordinator Substansi Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 0 Laporan Trw 4 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp - Trw 3 = Rp - Trw 4 = Rp 2.000.000	Subkoordinator Substansi Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 1.380.000 Trw 3 = Rp 1.380.000 Trw 4 = Rp 2.000.000	Subkoordinator Substansi Keuangan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 1.500.000 Trw 3 = Rp 1.500.000 Trw 4 = Rp 1.500.000	Subkoordinator Substansi Keuangan
3.			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1 Dokumen Trw 2 = 2 Dokumen Trw 3 = 3 Dokumen Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp 3.459.000 Trw 2 = Rp 5.637.000 Trw 3 = Rp 7.822.000 Trw 4 = Rp 10.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 3 Orang Trw 3 = 3 Orang Trw 4 = 3 Orang	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 15.000.000 Trw 3 = Rp 15.000.000 Trw 4 = Rp 15.000.000	
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Trw 1 = 2 Paket Trw 2 = 2 Paket Trw 3 = 2 Paket Trw 4 = 2 Paket	Trw 1 = Rp 4.744.000 Trw 2 = Rp 4.744.000 Trw 3 = Rp 5.500.000 Trw 4 = Rp 5.500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Trw 1 = 1 Paket Trw 2 = 2 Paket Trw 3 = 3 Paket Trw 4 = 3 Paket	Trw 1 = Rp 9.811.000 Trw 2 = Rp 18.727.000 Trw 3 = Rp 28.028.000 Trw 4 = Rp 36.950.000	Subkoordinator Substansi Keuangan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4 Dokumen Trw 2 = 4 Dokumen Trw 3 = 4 Dokumen Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp 990.000 Trw 2 = Rp 1.980.000 Trw 3 = Rp 2.970.000 Trw 4 = Rp 3.960.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = Rp 600.000 Trw 2 = Rp 1.800.000 Trw 3 = Rp 2.400.000 Trw 4 = Rp 3.600.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 10 Laporan Trw 2 = 10 Laporan Trw 3 = 17 Laporan Trw 4 = 20 Laporan	Trw 1 = Rp 58.380.000 Trw 2 = Rp 58.380.000 Trw 3 = Rp 96.705.000 Trw 4 = Rp 96.705.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = Rp 250.000 Trw 2 = Rp 250.000 Trw 3 = Rp 500.000 Trw 4 = Rp 500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = Rp 16.710.000 Trw 2 = Rp 33.420.000 Trw 3 = Rp 50.130.000 Trw 4 = Rp 66.840.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = Rp 62.694.000 Trw 2 = Rp 97.929.000 Trw 3 = Rp 157.417.000 Trw 4 = Rp 177.577.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Trw 1 = 24 Unit Trw 2 = 51 Unit Trw 3 = 74 Unit Trw 4 = 74 Unit	Trw 1 = Rp 104.140.000 Trw 2 = Rp 199.680.000 Trw 3 = Rp 263.220.000 Trw 4 = Rp 331.460.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 9 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 18 Unit Trw 4 = 21 Unit	Trw 1 = Rp 11.050.000 Trw 2 = Rp 11.350.000 Trw 3 = Rp 18.650.000 Trw 4 = Rp 18.950.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 1 Unit Trw 2 = 1 Unit Trw 3 = 1 Unit Trw 4 = 1 Unit	Trw 1 = Rp 38.500.000 Trw 2 = Rp 38.500.000 Trw 3 = Rp 38.500.000 Trw 4 = Rp 38.500.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
8		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 15.073.000 Trw 2 = Rp 35.713.000 Trw 3 = Rp 45.928.000 Trw 4 = Rp 54.918.000	Subkoordinator substansi Bina Usahatani Tanaman Pangan
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Trw 1 = 9 Laporan Trw 2 = 18 Laporan Trw 3 = 27 Laporan Trw 4 = 36 Laporan	Trw 1 = Rp 20.713.000 Trw 2 = Rp 68.848.000 Trw 3 = Rp 81.973.000 Trw 4 = Rp 83.525.000	Subkoordinator substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
9			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Subkoordinator substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 42.955.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 81.295.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 105.125.000	
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 45.570.000	Subkoordinator substansi Produksi Hortikultura
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 84.583.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 99.610.000	
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = Rp 107.985.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten /Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 13.668.000		
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 119.359.000		
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 130.000.000		
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 130.000.000		
10.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Trw 1 = 20 Ha	Trw 1 = Rp 6.765.000	Subkoordinator substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	
						Trw 2 = 65 Ha	Trw 2 = Rp 32.973.500		
						Trw 3 = 90 Ha	Trw 3 = Rp 56.094.750		
						Trw 4 = 105 Ha	Trw 4 = Rp 59.867.250		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
11.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	Trw 1 = 15 Unit Trw 2 = 15 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 15 Unit	Trw 1 = Rp 38.000.000 Trw 2 = Rp 368.619.000 Trw 3 = Rp 402.679.000 Trw 4 = Rp 436.429.000	Kepala UPTD BP3
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 0 Unit Trw 4 = 625 Unit	Trw 1 = Rp 12.530.000 Trw 2 = Rp 195.133.500 Trw 3 = Rp 222.573.500 Trw 4 = Rp 222.573.500	Subkoordinator substansi Bina Usahatani Hortikultura
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat	Terlaksananya Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Trw 1 = 1 Unit Trw 2 = 3 Unit Trw 3 = 4 Unit Trw 4 = 4 Unit	Trw 1 = Rp 24.252.000 Trw 2 = Rp 128.699.000 Trw 3 = Rp 162.125.000 Trw 4 = Rp 162.125.000	Sub Koordinator Substansi Produksi Hortikultura
				Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dibentuk	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 0 Unit Trw 4 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 12.280.000 Trw 2 = Rp 47.042.000 Trw 3 = Rp 68.817.000 Trw 4 = Rp 75.117.000	Subkoordinator substansi Penyuluhan Pertanian

Liwa, Pebruari 2025

Kepala Dinas



Ir. NATA DIJUDIN AMRAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661226 199203 1 001



LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN PERUBAHANNYA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Teratai No.6 Kompleks Perkantoran Pemda Way Mengaku Liwa 34811
Telp./Fax. 0728 21115

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PAROSIL MABSUS**

Jabatan : Bupati Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, Pebruari 2025

Pihak Kedua,

PAROSIL MABSUS

Pihak Pertama,

Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Produksi Tanaman Pangan - Produksi Hortikultura	95.913 Ton 76.656 Ton
			172.569 Ton

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9.091.884.900	
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 351.553.000	
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 130.000.000	
3. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 59.867.250	
4. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 896.244.500	
Jumlah Anggaran	Rp. 10.529.549.650	

Liwa, Pebruari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Teratai No.6 Kompleks Perkantoran Pemda Way Mengaku Liwa 34811
Telp./Fax. 0728 21115

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MAIDAR, SH, MSi.**

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PAROSIL MABSUS**

Jabatan : Bupati Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, Oktober 2025

Pihak Kedua,

PAROSIL MABSUS

Pihak Pertama,

MAIDAR, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690417 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Produksi Tanaman Pangan - Produksi Hortikultura	95.913 Ton 76.656 Ton
			172.569 Ton

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.701.737.942	
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 284.829.000	
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 2.655.892.000	
3. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 43.382.000	
4. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 812.955.500	
Jumlah Anggaran	Rp. 12.498.796.442	

Liwa, Oktober 2025





LAMPIRAN III
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN



PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN









PENYERAHAN ALSINTAN DAN PANEN PADI



SEKOLAH LAPANG PEMBUATAN PUPUK ORGANIK





GERAKAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN HORTIKULTURA





GERAKAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN PANGAN





PENGEMBANGAN PANGAN LESTARI (P2L)

